

# **PARTISIPASI PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA LOKAPAKSA KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG**

Oleh : Kadek Agus Ariana<sup>1</sup> dan I Nyoman Sukraaliawan<sup>2</sup>

## **Abstraksi**

Untuk suksesnya program Keluarga Berencana, maka partisipasi istri dan suami sebagai Pasangan Usia Subur (PUS) sangat diperlukan. Ber-KB bukan hanya untuk wanita/istri, tetapi juga untuk pria/suami. Dengan demikian tujuan dari program KB yakni mencapai keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera bisa terwujud.

Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ?; 2) apakah faktor penghambat partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ?; dan 3) apakah solusi dari hambatan-hambatan partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan secara sirkuler dimana analisis dilakukan sepanjang proses penelitian, dengan tahapan ; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi.

Dari hasil penelitian ditemukan fakta partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa dalam bentuk *voice, access, control*, dan partisipasi dalam menerima dan memberi informasi tentang KB

Faktor-faktor penghambat partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa terdiri dari faktor struktural dan faktor kultural. Solusi dalam menghilangkan faktor penghambat partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa adalah dengan memberikan informasi dan pengetahuan yang benar dan tepat tentang program KB melalui KIE. Juga dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat PUS tentang pentingnya ikut program KB.

## **Kata Kunci : partisipasi, PUS, program KB**

<sup>1</sup> Staf BKKBN Kecamatan Seririt, email [arya\\_81bagus@yahoo.co.id](mailto:arya_81bagus@yahoo.co.id)

<sup>2</sup> Staf Pengajar Universitas Panji Sakti, email [sukraaliawan@unipas.ac.id](mailto:sukraaliawan@unipas.ac.id)

## **1. PENDAHULUAN**

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Keluarga Berencana juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. Program KB sangat penting dalam mendukung percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan demi terlaksananya

program tersebut. Tujuan awal program Keluarga Berencana adalah untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (BKKBN Provinsi Bali, 2017 : 11 ). Di samping itu KB juga bertujuan sebagai pengatur kelahiran, pedewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga. Dengan program ini dapat meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang memiliki karakter bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pada pasal 1 (8) menyebutkan Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Program Keluarga Berencana Nasional harus mampu memposisikan diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat, terutama dalam menjamin kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang lebih baik, serta mampu menghargai hak reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Di samping itu, program KB nasional harus dapat menempatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya.

Untuk mensukseskan program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui program KB, maka partisipasi masyarakat merupakan kunci dari terlaksananya program KB. Partisipasi masyarakat dapat berupa partisipasi aktif maupun pasrtisipasi pasif. Adanya keetrlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi sangat berguna untuk melihat kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.

Pencapaian program KB sudah sangat bagus dalam penggunaan alat kontrasepsi sehingga program yang lain diarahkan kepada kualitas hidup manusia. Untuk pelayanan KB dalam hal ini penggunaan alat kontrasepsi agar dilayani dengan memanfaatkan fasilitas mobil keliling dari Dinas Kependudukan Keluarga Berencana untuk menjangkau daerah terpencil. Untuk pelayanan KB secara umum masih fokus diberikan pada ibu-ibu tentang edukasi alat kontrasepsi serta pemberian edukasi kepada suami agar disarankan untuk mengikuti program KB.

Partisipasi pria menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan program Keluarga Berencana dalam memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas, kegiatan ini sebagai upaya pembangunan kesehatan di masyarakat (Karyani dan Ardana (2018: 40). Partisipasi pria/suami dalam kesertaan ber-KB adalah tanggung jawabnya serta berperilaku seksual yang sehat dan aman bagi dirinya, pasangan dan keluarganya.

Untuk suksesnya program Keluarga berencana tersebut, maka partisipasi istri dan suami sebagai Pasangan Usia Subur (PUS) sangat diperlukan. Ber-KB bukan hanya untuk wanita/istri, tetapi juga untuk pria/suami. Partisipasi Pasangan Usia Subur dalam program Keluarga Berencana merupakan bagian dari adanya kesetaraan dan keadilan gender, dimana pria/suami dan wanita/istri memiliki kedudukan yang sama dalam program Keluarga Berencana.

Saat ini masyarakat sudah banyak menggemari KB pria. KB pria merupakan pelayanan KB jangka panjang dengan program vasektomi. Medis Operasi Pria (MOP) atau Vasektomi merupakan kontrasepsi mantap yang paling aman, nyaman dan praktis digunakan setelah pasangannya tidak cocok dengan berbagai kontrasepsi wanita atau pasangan yang tidak menginginkan anak lagi (menyetop kelahiran). Pilihan untuk mengikuti vasektomi atas dasar kesepakatan pasangan sehingga ia akan lebih fokus untuk membiayai anak mengikuti pendidikan setinggi-tingginya (BKKBN Provinsi Bali, 2013 : 18). Keterlibatan pria dalam ber-KB terutama dengan program vasektomi merupakan partisipasi masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ikut mensukseskan program Keluarga Berencana Nasional.

Desa Lokapaksa merupakan salah satu desa di kecamatan Seririt yang masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS) sudah berpartisipasi dalam program Keluarga Berencana. Sebagian besar PUS yang ada di Desa Lokapaksa memang sudah mengikuti program KB. Mereka ber-KB dengan menggunakan berbagai macam alat kontrasepsi seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntik, dan Pil. Dari data yang diperoleh sampai Mei 2021 jumlah PUS di Desa Lokapaksa yakni sebanyak 1949 PUS, 1708 PUS (87,63 %) yang sudah ikut program KB. Sisanya 241 PUS (12,37 %) belum ikut program KB. Memang angka tersebut sudah cukup tinggi, tetapi target dalam Program Keluarga Nasional adalah semua PUS diharapkan ikut program KB.

Permasalahan yang ditemui di lapangan, masih adanya PUS yang belum mengikuti program KB diantaranya adalah karena faktor ekonomi seperti tidak ada biaya untuk ber-KB, faktor sosial dimana masih adanya sebagian kecil masyarakat yang berpikir bahwa anak adalah anugrah Tuhan sehingga tidak boleh ditolak kehadirannya, juga anak mereka anggap sebagai pembawa rejeki karena anak diharapkan bisa membantu meringankan pekerjaan orang tuanya, bahkan anak bisa disuruh untuk ikut orang tuanya bekerja. Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya pengetahuan PUS tentang program Keluarga berencana sehingga mereka masih enggan untuk ikut program Keluarga Berencana.

Berdasarkan uraian diatas dalam kaitannya dengan partisipasi PUS dalam mengikuti program Keluarga Berencana, peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian : “ Partisipasi Pasangan Usia Subur ( PUS ) Dalam Program Keluarga Berencana di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Partisipasi PUS dalam Program Keluarga Berencana di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng?
2. Apakah hambatan partisipasi PUS dalam program Keluarga Berencana di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ?
3. Apakah Solusi terhadap hambatan partisipasi PUS dalam program Keluarga Berencana di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ?

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bungin (2012 : 32), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Sedangkan menurut Trianto (2011 : 179) penelitian kualitatif adalah penelitian yang percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.

Informan adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi dan pandangannya. Dalam penelitian yang dilaksanakan, maka informan yang dipandang mampu memberikan informasi yang akurat antara lain:Perbekel dan perangkat Desa

Lokapaksa, Ketua PKK Desa Lokapaksa, Koordinator PLKB Kecamatan Seririt, Bidan Desa, Tokoh masyarakat dan masyarakat Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di Desa Lokapaksa. Informan ditunjuk secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang masalah yang ditelaah.

Menurut Moleong (2010), perumusan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu peneliti sudah berada dilatar penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Partisipasi PUS dalam program Keluarga Berencana di Desa Lokapaksa, yang meliputi:
  - a. *Voice*, yakni hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan gagasan masalah KB.
  - b. *Acces*, yakni terlibat aktif dalam mengelola Posyandu
  - c. *Control*, yakni terlibat dalam mengawasi hasil program KB
  - d. Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi.
2. Faktor-faktor Penghambat partisipasi PUS dalam Program Keluarga berencana, yang meliputi : faktor struktural dan faktor kultural.
3. Solusi dalam menghilangkan hambatan partisipasi PUS dalam program KB, meliputi solusi secara struktural dan solusi secara kultural.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Lokasi ini dipilih dengan alasan karena sepanjang pengamatan peneliti belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Juga karena tersedianya data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Selanjutnya analisis data menggunakan empat tahapan seperti yang disampaikan oleh Milles dan Huberman (Sugiyono, 2013), yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan/verifikasi.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Partisipasi PUS dalam Program KB di Desa Lokapaksa**

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau anggota masyarakat yang ikut dalam proses pengambilan beberapa bagian dalam kegiatan bersama. Terkait dengan partisipasi masyarakat khususnya partisipasi PUS di Desa Lokapaksa dalam program Keluarga Berencana, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi PUS

tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa hal yaitu : *voice*, *acces*, *control*, dan partisipasi dalam menerima dan memberi informasi.

Setiap warga masyarakat khususnya PUS yang ada di Desa Lokapaksa memiliki hak untuk ikut menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap program KB supaya program yang diikutinya tersebut memberikan manfaat bagi kesejahteraan hidup keluarganya. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat PUS memang sangat dibutuhkan bagi kemajuan dan berhasilnya program KB di Desa Lokapaksa. Partisipasi masyarakat PUS tersebut bisa berupa aspirasi, gagasan, tuntutan atau menyampaikan kebutuhan dan kepentingannya berkaitan dengan program KB yang diikutinya. Hal tersebut oleh Juliantara (2012 : 90-91) disebut dengan *voice*, yang maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Juga sesuai dengan yang disampaikan Syamsi (2009 : 41) bahwa partisipasi bukan saja sekedar melaksanakan apa yang telah diputuskan pihak lain, tetapi partisipasi berproses dari penyusunan rencana pelaksanaan sampai pada pengawasan partisipasi, ikut sertanya masyarakat secara langsung, tetapi juga sumbangan ide-ide, gagasan serta pendapat lainnya yang kiranya dapat bermanfaat bagi efektifitas pelaksanaan program pembangunan.

Bentuk partisipasi lain PUS di Desa Lokapaksa adalah mereka ikut serta secara aktif dalam memanfaatkan keberadaan Posyandu yang ada di masing-masing Banjar Dinas yang ada di Desa Lokapaksa. Seperti data yang diperoleh dari dokumen yang ada, bahwa Posyandu yang ada di Desa Lokapaksa berjumlah 9 (sembilan) yang lokasinya tersebar di 9 (sembilan) Banjar Dinas yang ada di Desa Lokapaksa. Sekali dalam sebulan di masing-masing Posyandu tersebut diadakan kegiatan pelayanan kepada Balita, Ibu hamil dan PUS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, didukung dengan hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian khususnya di Posyandu, juga melihat data dokumen tentang kunjungan dan kehadiran masyarakat khususnya PUS di kegiatan Posyandu, dapat diketahui bahwa masyarakat khususnya PUS di Desa Lokapaksa sudah memanfaatkan dengan baik keberadaan Posyandu yang kegiatannya dilaksanakan setiap sebulan sekali. Masyarakat sudah memanfaatkan berbagai pelayanan

kesehatan serta informasi yang diberikan pada kegiatan Posyandu, karena mereka menyadari bahwa Posyandu tersebut adalah milik bersama. Hal tersebut oleh Juliantara (2012 : 90-91) disebut sebagai salah satu sekuen partisipasi yang disebutnya dengan *Access*, maksudnya adalah partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam mengelola barang-barang publik, termasuk di dalamnya akses terhadap pelayanan publik.

Keterlibatan PUS dalam mengawasi jalannya program KB termasuk hasil dari program KB itu sendiri menjadi bentuk partisipasi PUS di Desa Lokapaksa dalam program KB. Berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para informan, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program KB di Desa Lokapaksa, masyarakat khususnya PUS sudah mau dan mampu melibatkan dirinya khususnya dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program KB terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggarannya. Pelaksana program KB juga sudah secara terbuka menyampaikan berbagai program KB yang dijalankan, termasuk penggunaan anggarannya. Petugas KB juga sudah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat PUS untuk menunjang pelaksanaan program KB. Hal ini menurut Juliantara (2012 : 90-91) disebut dengan *Control*, yang maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya. Dalam konteks pelaksanaan program KB di Desa Lokapaksa, masyarakat PUS mau dan mampu terlibat dalam mengawasi jalannya program KB tersebut sehingga mencapai tujuan sesuai dengan harapan bersama.

Selanjutnya dalam pelaksanaan program KB di Desa Lokapaksa, masyarakat PUS bisa terlibat atau berpartisipasi dalam menerima informasi terkait program KB dan kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada yang lainnya.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga orang informan, dapat diketahui bahwa masyarakat PUS di Desa Lokapaksa memanfaatkan media komunikasi atau media sosial untuk menerima dan memberi informasi terkait program KB. Hal ini merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana, yang sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Ndraha (2010 :

32), bahwa salah satu macam partisipasi adalah partisipasi dalam menerima dan memberi informasi.

### **3.2 Faktor-faktor Penghambat Partisipasi PUS dalam Program KB.**

Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Lokapaksa dalam mengikuti program Keluarga Berencana tentunya tidak bisa berjalan sempurna. Selalu saja ada faktor yang menjadi penghambatnya. Terkait permasalahan tersebut, hasil penelitian menemukan adanya 2 (dua) hal yang menjadi faktor penghambat partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa, yakni faktor struktural dan faktor kultural.

Faktor struktural yang menjadi penghambat partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa adalah terkait dengan adanya kebijakan atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan program KB yang menyebabkan turunnya minat PUS untuk ikut program KB. Salah satu hambatan struktural yang menghambat PUS di Desa Lokapaksa dan PUS di Provinsi Bali pada umumnya untuk berpartisipasi dalam program KB adalah adanya himbauan Gubernur Bali, I Wayan Koster, yang menghimbau masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu untuk menerapkan "KB Bali" dengan memiliki 4 (empat) orang anak, supaya nama "Nyoman" dan "Ketut" tidak punah.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan lewat wawancara, dapat diketahui bahwa adanya himbauan dari seorang pejabat yakni Gubernur Bali tentang "KB Bali" dimana masyarakat Hindu di Bali dianjurkan untuk memiliki anak sampai empat orang supaya nama "Nyoman" dan "Ketut" tidak punah, menjadi faktor penghambat secara struktural partisipasi PUS di Desa Lokapaksa untuk ikut program KB. Apalagi bagi sebagian orang awam yang tinggal di pedesaan, meskipun itu sebatas himbauan tetapi dianggap sebagai peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat setingkat Gubernur. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Nawawi (2012 : 67), yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya, proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dilakukan melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat 5P, yang salah satunya adalah Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

Faktor lainnya yang bisa disebut sebagai faktor struktural penghambat partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa adalah adanya pemahaman yang kurang benar akibat kurangnya informasi dan pengetahuan yang diperolehnya. Kondisi ini berkaitan dengan program KB berupa MOP (Medis Operasi Pria) atau yang biasa disebut Vasektomi.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan lewat wawancara, didukung bukti dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa hambatan partisipasi PUS di Desa Lokapaksa untuk ikut program Kb khususnya program MOP atau vasektomi karena kurangnya informasi dan pengetahuan PUS tentang vasektomi tersebut. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan strategi KIE dalam program KB, dimana KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) merupakan satu proses penyampaian pesan, informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang program KB dengan menggunakan berbagai media dengan tujuan utama untuk memecahkan masalah dalam lingkungan masyarakat dalam meningkatkan program KB atau sebagai penunjang tercapainya program KB (BKKBN Provinsi Bali, 2017)

Faktor kultural yang menjadi penghambat partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa adalah adanya budaya atau tradisi masyarakat Bali terutama yang beragama Hindu bahwa kalau belum memiliki anak laki-laki maka keluarga tersebut belum lengkap. Konsep *purusa-pradana* yang dimiliki oleh masyarakat Hindu di Bali dimana menempatkan keturunan laki-laki sebagai penerus garis keturunan tentunya menjadi penghambat partisipasi PUS dalam program KB, dimana dalam program KB slogannya adalah "dua anak cukup, laki perempuan sama saja".

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, didukung dengan hasil observasi di lokasi penelitian, dapat diketahui bahwa faktor budaya dimana orang Hindu Bali harus punya anak laki-laki karena akan menjadi penerus garis keturunan dan menjadi gantungan orang tua nantinya serta yang akan melanjutkan tradisi *ngayah* di sanggah merajan, menjadi faktor penghambat partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang oleh Nawawi (2012 : 67) dilakukan melalui penerapan pendekatan 5P yang salah satunya adalah Pemungkinan, yakni pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

### **3.3 Solusi dalam menghilangkan hambatan partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa**

Adanya faktor penghambat partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa harus segera dicarikan solusinya supaya program pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk lewat program Keluarga Berencana bisa tercapai dan keluarga yang bahagia sejahtera dengan dua anak cukup bisa segera dapat terwujud. Solusi yang diupayakan tentunya disesuaikan dengan faktor penghambatnya.

Untuk menghilangkan hambatan secara struktural partisipasi masyarakat PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa, terkait adanya himbauan Gubernur Bali, I Wayan Koster tentang "KB Bali" adalah dengan menyampaikan kepada masyarakat PUS bahwa apa yang disampaikan oleh Gubernur tersebut hanyalah sebatas himbauan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang informan, dapat diketahui bahwa solusi untuk menghilangkan hambatan struktural partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa terkait adanya himbauan Gubernur tentang "KB Bali" adalah dengan menyampaikan kepada masyarakat PUS bahwa itu semua hanya sebatas himbauan, bukan peraturan yang harus diikuti. Masyarakat PUS boleh mengikuti atau tidak himbauan tersebut. Masyarakat PUS berhak menentukan sendiri apa yang menjadi pilihannya, mau ikut program KB nasional dengan 2 (dua) anak cukup atau ikut "KB Bali" dengan memiliki 4 (empat) anak tetapi dengan resiko akan kesulitan nantinya dalam mensejahterakan keluarganya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Nawawi (2012) terkait pemberdayaan sebagai kecenderungan skunder, menekankan pada proses menstimulus mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Selanjutnya solusi terkait kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat PUS tentang program KB khususnya program KB pria yang biasa disebut vasektomi, maka yang dilakukan adalah lebih mengefektifkan lagi penggunaan media sebagai wahana penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat PUS. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, dapat diketahui bahwa solusi untuk menghilangkan hambatan partisipasi PUS di Desa Lokapaksa dalam program KB adalah dengan lebih mengefektifkan penggunaan media komunikasi dan media sosial untuk menyebarkan berbagai informasi dan pengetahuan terkait program KB khususnya tentang KB pria yang biasa disebut vasektomi. Hal tersebut sesuai

dengan program KIE yang selama ini menjadi andalan dalam penyebaran informasi tentang KB. KIE adalah proses penyampaian pesan, informasi kepada masyarakat tentang program KB dengan menggunakan berbagai media dengan tujuan untuk memecahkan masalah dalam lingkungan masyarakat dalam meningkatkan program KB atau sebagai penunjang tercapainya program KB (BKKBN Provinsi Bali, 2017)

Solusi yang dilakukan untuk menghilangkan hambatan kultural partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa yakni terkait masih kuatnya budaya dan tradisi masyarakat Hindu Bali yang menjadikan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan, adalah dengan memberikan pengertian dan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat PUS bahwa di jaman modern seperti sekarang ini anak laki-laki atau perempuan sama saja.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, dapat diketahui bahwa solusi untuk menghilangkan hambatan kultural partisipasi masyarakat PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa terkait adanya budaya dan tradisi pada masyarakat Hindu Bali secara umum yang masih menganggap anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan keluarga, bahwa dalam suatu keluarga harus ada anak laki-laki, sehingga mereka belum berhenti punya anak sebelum ada anak laki-laki, adalah dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi secara terus menerus bahwa ikut program KB dengan membatasi jumlah anak cukup dua saja, laki perempuan sama saja, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena dengan sosialisasi tersebut, masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan benar tentang sesuatu hal. Ini sesuai dengan pengertian sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang atau organisasi/perusahaan/lembaga tertentu memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu/terbatas (<https://id.answer.yahoo.c>). Juga seperti yang disampaikan oleh Sutaryo (2011) bahwa sosialisasi adalah merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem kepada seseorang, serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Dengan cara seperti ini semua informasi akan dapat sampai kepada masyarakat secara utuh dan benar.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan dalam hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Partisipasi PUS dalam Program KB di Desa Lokapaksa dilaksanakan dengan : *voice*, yaitu hak dan tindakan masyarakat PUS dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan atas kebijakan pemerintah, *access*, yaitu terlibat aktif dalam memanfaatkan keberadaan posyandu, *control*, yaitu ikut mengawasi pelaksanaan program KB termasuk mengawasi hasil dari program KB supaya pelaksana program KB bertindak secara transparan, akuntabel dan responsif. Juga dengan berpartisipasi dalam menerima dan memberi informasi.
2. Faktor penghambat partisipasi PUS dalam program KB di Desa Lokapaksa adalah faktor struktural berupa adanya himbuan Gubernur Bali tentang "KB Bali" dan kurangnya informasi dan pengetahuan yang didapat PUS tentang program KB khususnya yang berkaitan dengan vasektomi. Sedangkan hambatan kulturalnya adalah masih lekatnya budaya dan tradisi masyarakat Hindu Bali yang menjadikan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan keluarga, dimana PUS belum berhenti punya anak jika belum ada anak laki-laki.
3. Solusi untuk menghilangkan faktor penghambat secara struktural adalah dengan menyadarkan masyarakat PUS bahwa apa yang disampaikan oleh Gubernur Bali itu hanya sebatas himbuan bukan peraturan dan masyarakat PUS tidak harus mengikutinya. Juga dengan lebih mengencarkan lagi penggunaan media yang ada untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang tepat dan benar terkait program vasektomi. Sedangkan solusi secara kultural adalah dengan tidak henti-hentinya memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat PUS bahwa budaya yang mengharuskan ada anak laki-laki dalam suatu keluarga itu sudah tidak relevan lagi di jaman yang serba modern seperti sekarang ini. Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan saat ini sudah setara.

### **4.2 Saran – saran**

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan di atas, dapat disampaikan beberapa saran yaitu :

1. Partisipasi masyarakat PUS dalam program KB hendaknya harus selalu ditingkatkan supaya program KB bisa mencapai tujuan yang diharapkan yakni terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.
2. Berbagai hambatan yang dijumpai oleh pelaksana program KB di lapangan hendaknya dijadikan cambuk dan motivasi untuk lebih semangat lagi menjalankan tugasnya mengajak masyarakat khususnya PUS untuk ikut dalam program KB.
3. Pendekatan kepada masyarakat PUS hendaknya selalu dilakukan dengan berbagai metode dan teknik pendekatan supaya masyarakat sadar akan pentingnya ikut program KB demi kesejahteraan keluarga dan masa depan anak-anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN Provinsi Bali, 2013, *Masyarakat Kota Menggemari KB Pria*, dalam Bali Rahajeng Media Komunikasi Edisi VIII April 2013
- BKKBN, 2015, *Pelayanan KB, Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga*, Jakarta.
- BKKBN Provinsi Bali, 2017, *KB Membentuk Keluarga Sesuai Kekuatan Ekonomi*, dalam Bali Rahajeng, Media Komunikasi Edisi XIV Juni 2017
- Bungin, Burhan, 2012, *Analisis Data Kualitatif : Pemahaman Filosofis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Perkasa : Jakarta
- Hendarso, Emy Susanti. 2011 . *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (ed), Penelitian Kualitatif : Sebuah Pengantar*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Juliantara, Dadang, 2012, *Desentralisasi Kerakyatan, Gagasan & Praksis*, PT. Bina Aksara : Jakarta.
- Karyani, Luh dan Dewa Made Joni Ardana, 2018. "Peranan PLKB dalam Penyebaran Informasi Tentang KB Kepada Masyarakat di Desa Sudaji Kecamatan Sawan". Dalam Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 9 No. 1 – Pebruari 2018. FISIP UNIPAS
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya : Bandung
- Nawawi, Ismail, 2012. *Pembangunan dan Problema Masyarakat, Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*, Putra Media Nusantara : Surabaya.

- Ndraha, Taliziduhu, 2010, *Pembangunan Masyarakat*, PT. Bina Aksara : Jakarta
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta : Bandung
- Sutaryo, 2011, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, Rajawali Press : Jakarta.
- Syamsi, Ibnu, 2009, *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*, Kanisius : Yogyakarta
- Trianto, 2011, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Kencana : Jakarta
- Turindra, Azis, 2009, *Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa*, Universitas Negeri Semarang.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga